



Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Solok

Asma Ul Husna ¹, Dessi Susanti ²

Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: husna5340@gmail.com

Abstract : This study plans to investigate: (1) local taxes on the implementation of regional financial performance (2) regional levies on financial performance (3) separate regional wealth results on financial performance (4) other PAD on financial performance. This exploration delegated a similar causal examination. The information used is the regional government financial plan (APBD) report and the 1990-2019 APBD revenue report distributed by the Directorate General of Fiscal Balance (DJPB). The exploration subjects are local taxes, regional levies, and the original PAD used is a quantitative investigation, with different relapse models. Speculation testing uses the F test, the measured t test is 5% and the straight difference test. Exploration shows that local revenue (PAD) has so far influenced the implementation of regional finance. However, to some extent, only other closest unique income affects financial performance, while environmental costs, necessitating isolated local organizational properties and resources have no effect on financial performance in Solok District.

Keywords : local own-source revenue, financial performance



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Perubahan dari orde baru pada tahun 1998 membawa banyak perubahan pada pemerintahan Indonesia. Perubahan tersebut bukan hanya terjadi pada lingkup daerah pusat saja tetapi juga terjadi pada daerah lainnya di Indonesia. Kemudian ketika masa reformasi, kerangka kewenangan publik yang semula sentralisasi mulai menjadi desentralisasi. Hal ini diindikasikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Pedoman ini adalah alasan untuk memungkinkan kemandirian lokal yang lebih menonjol ke pemerintahan daerah (Alfarisi, 2015).

Dilihat dari sudut yang dapat dibuktikan, perjalanan perubahan manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: 1. Masa pra-kemerdekaan dan masa desentralisasi keuangan (1974-1999), 2. Masa peralihan kemerdekaan (2000-2003), dan 3. Waktu pasca-kemajuan (2004-sekarang). Perubahan administrasi keuangan daerah mulai dilakukan setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan sebuah bentuk tahap awal untuk mempromosikan kemajuan pemerintahan Indonesia (Cherrya, 2015).

Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah disertai dengan penyerahan tanggung jawab pendanaan daerah. Titik fokus pemerintah adalah untuk meningkatkan kecakapan dengan mengurangi pengeluaran terutama melalui pencapaian skala ekonomi dengan menunjukkan aset dan membawa fungsi pemerintah lebih dekat dengan masyarakat (Galariotis et al., 2016).

Desentralisasi pada dasarnya adalah pemusatan administrasi pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan adanya kekuasaan pemerintah daerah (Alfarisi, 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa arah strategi komponen eksekutif dengan tanggung jawab yang lebih besar diserahkan kepada kabupaten sehingga pelaksanaan praktik pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih kuat dan efektif.

Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam melaksanakan rencana kerja pembangunan daerah dan juga secara tidak langsung mendukung rencana pembangunan nasional. Bertekad untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan kepada swatantra wilayah untuk mempraktekkan kebebasan daerah dengan menetapkan UU No.12 Tahun 2008 mengenai Perubahan ke 2, Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang kebijakan Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam mengelola kebijakan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat untuk menyusun, mengurus keuangan secara mandiri dan kepentingan daerah sekitarnya mengikuti aturan perundang-undang yang berlaku. (Aswar, 2019).

Salah satu ukuran penting untuk menentukan kapasitas asli daerah dalam menangani pemerintahannya adalah kapasitas lokal dalam bidang keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah merupakan representasi dari standar capaian administrasi keuangan dalam melaksanakan suatu gerakan program strategi dalam memahami tujuan, target, visi, misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013). Kinerja keuangan Pemda merupakan suatu bentuk representatif dari penilaian secara kuantitatif atas suatu pembangunan/program dalam mencapai tujuan dan ketetapan dari pemerintah daerah. Hasil atas pelaksanaan keuangan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi dan melakukan penetapan terhadap langkah selanjutnya yang akan dipilih sehingga kinerja keuangan meningkat dan lebih baik (Sari dan Wati, 2021).

Pemerintah daerah seharusnya lebih siap untuk menyelidiki sumber-sumber keuangan, terutama untuk mengatasi masalah pemerintahan dan kemajuan di kabupaten melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan bentuk pembayaran yang didapatkan dari daerah yang berasal dari dalam daerahnya yang dikumpulkan sesuai dengan pedoman dan

peraturan perundangan (Halim dan Kusufi, 2017). Kontrol pemerintah daerah atas pendapatan yang dibebankan sangat penting untuk memberdayakan tugas yang diperluas dan otonomi pemerintah di sekitarnya (Gray dan Barford, 2018). Perluasan otonomi daerah erat kaitannya dengan menyelesaikan masalah penunjang pemerintahan dan kemajuan di daerah melalui PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk imbalan yang didapatkan dan berasal dari wilayah yang sebenarnya dikumpulkan berdasarkan peraturan perundangan dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2016).

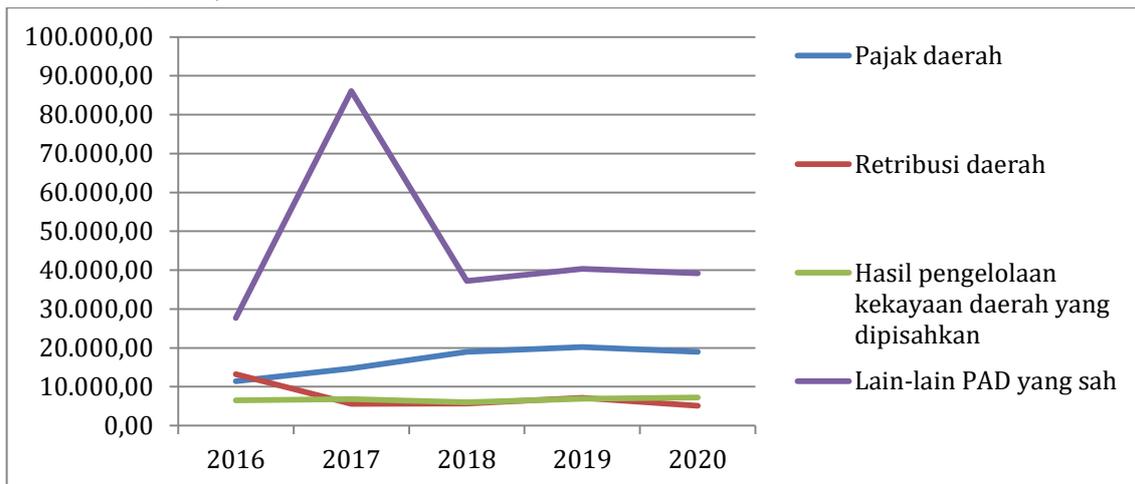
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu dari sekian banyak kerangka dan infrastruktur yang secara empatik mempengaruhi perkembangan keuangan daerah. Semakin besar perbaikan yang dilakukan, maka dapat memperluas perkembangan kondisi kinerja keuangan daerah. Sebagai bentuk adanya perluasan fondasi perbaikan kerangka kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diyakini dapat mendorong pembangunan keuangan di kabupaten tersebut. Sebuah bentuk instrumen yang digunakan untuk memeriksa tampilan pemerintah daerah ketika menangani aset daerahnya adalah dengan memisahkan antara kinerja keuangan dibandingkan dengan realisasi APBD, terlebih jika ditinjau dari segmen PAD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. (Halim dan Kusufi, 2012).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mendorong ekspansi dalam kinerja keuangan otoritas publik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pemerintah daerah menekankan hasil dari PAD yang terdiri dari: (1) hasil penilaian daerah, (2) pajak daerah, (3) pengelolaan kekayaan daerah, (4) pendapatan asli daerah lainnya (UU No. 32 Tahun 2004).

Berdasarkan data Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa ketergantungan pendapatan dari 19 wilayah perkotaan dan kabupaten di Sumbar pada pemindahan aset dari pusat melalui cadangan penyesuaian masih tinggi. Dana perimbangan memberikan kontribusi 79,29% terhadap pengakuan pendapatan pada triwulan kedua dari triwulan terakhir tahun 2017, menurun dibandingkan triwulan kedua dari triwulan terakhir tahun 2016 yang sebesar 83,03%. Tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan menunjukkan bahwa PAD harus ditingkatkan, mengingat masih rendahnya hanya 9,25%. Meskipun telah menunjukkan komitmen yang meningkat dibandingkan dengan kuartal kedua dari kuartal terakhir 2016. Ketergantungan daerah pendapatan kota dan kabupaten di Sumbar pada pergerakan transfer dana dari pusat melalui Dana Perimbangan (DP) juga tinggi (Bank Indonesia, 2017).

Dapat diketahui bahwa tanda-tanda penurunan kinerja keuangan daerah dari turunnya pendapatan asli daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui DJPK menyatakan bahwa terjadi penurunan yang tidak biasa pada PAD Kabupaten Solok sejak tahun 2017 hingga 2018 dimana pengakuan PAD pada tahun 2017 sebesar Rp. 113,2 miliar sedangkan pada 2018 sebesar Rp. 68,3 miliar. Beberapa masalah keuangan daerah yang dilihat oleh Kabupaten Solok meliputi: (1) Terlalu terpacunya pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, (2) Rendahnya kapasitas lokal untuk menyelidiki kemungkinan sumber PAD, yang tercermin dari besaran yang relatif sedikit pengakuan pada PAD dan setiap pendapatan daerah, (3) Kurangnya tenaga dan kapasitas pendapatan daerah dalam mengawasi dan menyelidiki jenis pendapatan yang ada (Awwaliyah et al., 2019).

Rendahnya pendapatan masyarakat sekitar Kabupaten Solok disebabkan oleh kemampuan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemkab Solok membutuhkan banyak fasilitas yang harus segera diklaim. Misalnya pasar induk beras, sayur mayur dan produk organik, pangkalan truk untuk memindahkan hasil panen, pembangunan terminal angkutan umum, kebutuhan masyarakat terhadap pasar raya. Fasilitas ini mungkin bisa menghasilkan pendapatan sekaligus menjadi pendorong utama perekonomian daerah setempat. Sebagai informasi, PAD Kabupaten Solok tahun 2018 sebesar Rp. 71 miliar. Jika ditinjau dari besaran APBD yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp 1,2 triliun setiap tahun (Admin Pos Sumbar, 2019).



Grafik 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2020

Sumber : Data Diolah 2022

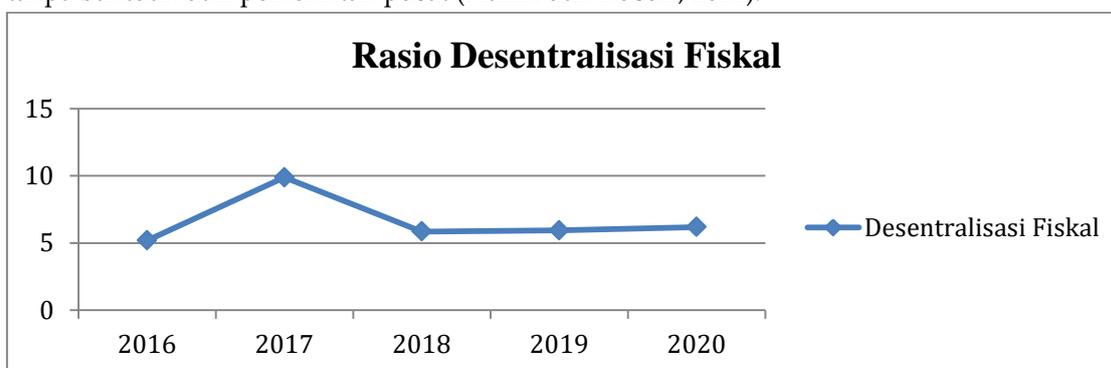
Pada grafik 1 terlihat bahwa peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan pada bagian pajak daerah. Sementara itu, PAD lainnya yang sah mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2017 hingga 2018. Hal ini juga terjadi pada beberapa komponen PAD lainnya yang berubah dari tahun ke tahun. Padahal, dengan kemampuan Kabupaten Solok, sudah sewajarnya memiliki opsi untuk mendanai setiap hal yang diperlukan oleh daerahnya guna mewujudkan kemampuan daerah dalam rangka desentralisasi.

Terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang lugas, adil, berdasarkan efektivitas dan tanggung jawab, maka diadakan pengukuran analisis rasio terhadap APBD. Kinerja keuangan pemerintah daerah diawasi melalui kontrol keuangan daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah adalah semua kebebasan dan komitmen daerah sehubungan dengan pelaksanaan pemerintah daerah yang dapat di survei dari segala macam pergerakan yang mencakup persiapan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian, pelaksanaan kewenangan, dan pengelolaan dana daerah (Elsye, 2016).

Kemampuan pemda untuk mencapai tujuan ini dikenal sebagai kinerja pemerintahan daerah. Peningkatan kinerja keuangan harus diselesaikan oleh pemerintah dan dukungan masyarakat. Kinerja sektor publik tidak sama dengan kinerja swasta. Untuk kinerja swasta sebagian besar perkiraan bergantung pada keuntungan yang adil dan merata, pada kinerja

sektor publik tidak dapat diperkirakan dengan tingkat keuntungan, karena salah satu tujuan pokok tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ermawati et al., 2021).

Kinerja keuangan pemda lebih rendah jika dilihat dengan kinerja keuangan swasta, Hal ini dikarenakan adanya kepentingan politik dalam pengambilan keputusan. Ini seiring dengan *Agency Theory* yang menyatakan bahwa akan sering terjadi pertentangan kepentingan antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (pemerintah). Kelompok masyarakat sebagai *principal* perlu menjamin bahwa *agent* yang telah dipilih untuk menangani otoritas publik akan memberikan keuntungan bagi pembangunan daerah (Faroza dan Susanti, 2021). Salah satu rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan adalah rasio desentralisasi fiskal. Rasio ini membandingkan realisasi PAD secara utuh terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini dapat dimanfaatkan sebagai pengukuran kontribusi PAD terhadap sumber penerimaan daerah. Semakin tinggi hasilnya, semakin baik suatu daerah dalam mendanai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat (Halim dan Kusufi, 2012).



Grafik2. Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2020

Sumber : Data Diolah 2022

Pada grafik 2 dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Solok sangat kurang, Hal ini disebabkan kinerja keuangan Kabupaten Solok <10.00. Sementara itu, untuk berada pada tingkat keuangan daerah yang memadai, ia harus memiliki tingkat desentralisasi dari 20,01 hingga 30,00. Sehingga dengan menggunakan rasio desentralisasi fiskal dalam mengukur kemampuan keuangan daerah, peneliti melakukan analisis mengenai seberapa besar pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Solok pada tahun 1990- 2019. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Di Kabupaten Solok”**.

METODE PENELITIAN

Metode eksplorasi pada penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan APBD dan laporan realisasi APBD yang diperoleh dari organisasi terkait, BPS Daerah Sumbar dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data pada penelitian ini menggunakan data *time series* dari

tahun 1990 sampai 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diharapkan dapat merinci dampak PAD terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok Pada tahun 1990 - 2019. Sebelum dilakukan uji analisis linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat mendasar dalam menguji spekulasi koefisien regresi pada persamaan regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Selain itu, analisis linear berganda dan pengujian hipotesis khususnya, uji T, uji F, dan koefisien determinasi (R²).

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov mendapatkan hasil signifikan yang diperoleh dari nilai Asym 2 tailed yaitu $0,334 > 0,05$. Nilai sig $> 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa uji normalitas dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Selanjutnya, Uji Multikolinearitas diselesaikan dengan memanfaatkan nilai VIF dan tolerance. Berdasarkan hasil SPSS, terlihat bahwa nilai VIF pajak adalah 7,052; retribusi daerah 3,605; kekayaan daerah dipisahkan 9,707 dan PAD lainnya yang sah 4,010. Masing-masing nilai VIF dari keempat faktor tersebut lebih $< 10,00$. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varians dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya (Ghozali, 2019). Hasil uji heteroskedastisitas dengan scatter plot dapat diduga bahwa desain penyebaran titik secara acak dan diantara angka 0 dan sumbu Y tidak membuat pola yang jelas, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Demikian juga, uji autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson (DW), Nilai dari Durbin-Watson adalah 1,834 berada pada rentangan $-2 < 1,834 < +2$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki autokorelasi.

Selain itu, penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis pada variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 1. Uji F

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 31,263 | 4 | 7,816 | 6,290 | ,001 ^a |
| | Residual | 31,063 | 25 | 1,243 | | |
| | Total | 62,326 | 29 | | | |

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022

Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa pentingnya nilai pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), hasil kekayaan daerah (X3) dan PAD lainnya yang sah (X4) terhadap Kinerja

Keuangan (Y) adalah $0,001 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini dapat dikatakan bahwa pajak daerah, pungutan daerah, kekayaan daerah dan PAD asli lainnya secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok.

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted Square | R Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|----------------------|-------------------|----------|-----------------|------------------------------|---------------|
| dim 1 ensi on0 | ,708 ^a | ,502 | ,422 | 1,11468 | 1,834 |

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 2022

Pada tabel 2. diketahui bahwa koefisien Adjusted R2 sebesar 0,422. Artinya, kinerja keuangan di Kabupaten Solok dapat dipengaruhi oleh variabel independen, khususnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD lainnya yang sah sebesar 42,2%.

Tabel 3. Uji T Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | T | Sig. |
| 1 | (Constant) | 4,471 | ,296 | | 15,123 | ,000 |
| | X1 | -0,02143 | ,000 | -,082 | -,220 | ,828 |
| | X2 | 0,01481 | ,000 | ,039 | ,147 | ,884 |
| | X3 | ,000 | ,000 | -,451 | -1,024 | ,316 |
| | X4 | 0,08569 | ,000 | 1,058 | 3,741 | ,001 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,471 - 0,02143X_1 + 0,01481X_2 + 0,000X_3 + 0,08569X_4 + e$$

Nilai regresi positif sebesar 4,471; Ini berarti bahwa keempat variabel bebas dianggap konstan dengan nilai kinerja keuangan sebesar 4,471%. Pajak daerah memiliki koefisien negatif -0,02143. Ini berarti bahwa pajak meningkat satu satuan, kinerja keuangan akan berkurang sebesar 0,02143% satuan. Retribusi daerah memiliki nilai regresi positif sebesar 0,01481. Ini berarti bahwa dengan asumsi retribusi daerah meningkat satu satuan, kinerja keuangan akan meningkat 0,01481 satuan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah memiliki nilai regresi 0,00. Hal ini dimaksudkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah meningkat satu satuan, Kinerja keuangan tidak bertambah atau berkurang. PAD lainnya yang sah memiliki koefisien regresi

positif sebesar 0,08569. Artinya, jika PAD asli lainnya bertambah satu satuan, maka kinerja keuangan akan naik 0,08569%.

Dari hasil pemeriksaan pada tabel diperoleh koefisien regresi pajak daerah negatif adalah -0,02143 dengan nilai t-hitung sebesar -0,220 dan nilai sig 0,828 > 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah kurang berperan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok. Berdasarkan tabel, koefisien regresi retribusi daerah adalah 0,01481 dengan nilai t-hitung 0,147 dan nilai sig 0,884 > 0,05 sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. Ini dapat dikatakan bahwa retribusi daerah sangat mempengaruhi kinerja keuangan di Kabupaten Solok. Selain itu, dari hasil analisis pada tabel didapatkan nilai koefisien kekayaan daerah yang dipisahkan adalah 0,000 dengan t-hitung sebesar -1,024 dan signifikansi 0,316 > 0,05 sehingga H0 diterima dan H3 ditolak. Ini menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah kurang berdampak pada kinerja keuangan. Dari hasil analisis, nilai koefisien PAD lainnya yang sah adalah 0,08569 dengan nilai t-hitung sebesar 3,741 dan makna 0,001 < 0,05. Hal ini berarti bahwa PAD lainnya yang sah mempengaruhi kinerja keuangan di Kabupaten Solok.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil olah data statistik dinyatakan bahwa hipotesis pertama dari penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah berdampak negatif pada kinerja keuangan dan hasilnya ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig 0,828 > 0,05 (di atas 5%). Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Wenny, CD (2015). Dimana pajak berdampak negatif pada kinerja keuangan, karena berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, faktor pajak tidak terlalu mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini diperkuat dengan nilai sig > 0,05 (Cherrya, 2015).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pajak daerah terhadap pendapatan sekitar masih kecil. Manajemen pajak daerah harus memiliki pilihan untuk membuat kerangka kerja pemilihan yang praktis, mahir dan layak. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa pendapatan lebih tinggi daripada biaya lainnya. Demikian pula, pemerintah daerah perlu mengikuti penilaian terhadap pendapatan (Mahmudi, 2016). Kepala Bidang Pendapatan BKD mengungkapkan "bahwa dari 11 jenis pajak yang diajukan ke kecamatan, ada 3 macam pengeluaran yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Solok, yaitu pajak restoran, PBB, dan hiburan. Dari 11 macam pajak hanya ada 3 macam yang dievaluasi oleh pemerintah daerah yaitu pajak air tanah, reklame dan BPTHB. Dalam hal ini yang menjadi persoalan besar adalah adanya tunggakan yang belum dibayar pada 3 macam pengeluaran, untuk pajak restoran, pungutan PBB, pungutan hiburan, sehingga masih jauh dari tujuan yang telah ditetapkan.

Penyebab utama tidak terpenuhinya pajak daerah di Kabupaten Solok adalah tidak adanya inisiatif warga dalam penyelesaian pajak, pindah daerah, wajib pajak tidak ditempat, dan SPPT tidak muncul. Kewaspadaan masyarakat dalam membayar pajak merupakan unsur utama dan akan sangat mempengaruhi kemampuan pembayaran pajak daerah. Masih banyak warga yang tidak tahu tentang pembayaran pajak karena informasi pajak rendah. Hal ini tentu

menjadi masalah tersendiri dalam meningkatkan pendapatan pajak sehingga komitmen pungutan pajak daerah terhadap pendapatan daerah masih kecil dan mengakibatkan rendahnya pelaksanaan keuangan daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil olah data statistik dinyatakan bahwa hipotesis kedua mempengaruhi kinerja keuangan, variabel retribusi daerah secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini ditegaskan dengan nilai sig $0,884 > 0,05$ (di atas 5%). Hal ini sesuai dengan penelitian Abdullah (2015), di mana retribusi daerah sangat mempengaruhi kinerja keuangan dengan nilai signifikansi $> 0,05$ (Abdullah et al., 2015).

Hal ini dikarenakan porsi retribusi daerah di Kabupaten Solok memiliki bagian yang lebih kecil dari pendapatan asli daerah lainnya. Retribusi daerah adalah salah satu penanda untuk menilai dan memutuskan presentasi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah seharusnya dapat menduplikasi kekayaan asli daerah untuk mendukung pembangunan di daerah guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini terjadi karena masih banyak permasalahan retribusi yang sering terjadi. Misalnya, masalah parkir di pinggir jalan umum atau di sektor bisnis konvensional yang banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Aturan pemerintah yang diberlakukan tidak ada gunanya, karena seharusnya mereka adalah pengumpul retribusi yang harus menyimpan dan menyetorkan ke pemerintah daerah, tetapi mereka gunakan untuk kepentingan pribadi.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil olah data statistik pada penelitian ini, dikemukakan bahwa hipotesis ketiga menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan hasilnya ditolak dengan nilai signifikansi $0,316 > 0,05$ (di atas 5%). Hal ini sejalan dengan penelitian Apridiyanti, Ajeng (2019), dimana Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdampak buruk pada kinerja keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih memiliki pengaruh yang kecil terhadap kinerja keuangan (Apridiyanti, 2019).

Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil proses olah data statistik dalam penelitian ini diungkapkan bahwa hipotesis keempat menyatakan bahwa PAD lainnya yang sah mempengaruhi kinerja keuangan dan hasilnya diterima, dengan alasan bahwa variabel PAD lainnya yang sah secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ (dibawah 5%). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD lainnya yang sah pada dasarnya mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah dianggap mampu memaksimalkan PAD lainnya yang sah sebagai sumber pendapatan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gusti Made Ayu Apriliananda (2016), dimana

PAD lainnya yang sah secara nyata mempengaruhi kinerja keuangan dan hasilnya diterima (Aprilianda, 2016).

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil olah data statistik menyatakan bahwa (H5) diterima. Berdasarkan uji F yang menunjukkan adanya kontribusi positif antara pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya yang sah terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dikuatkan dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,422 atau 42,2%. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya yang sah terhadap kinerja keuangan adalah 42,2% sedangkan sisanya 57,8% dipengaruhi oleh berbagai komponen yang tidak dirinci dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya yang sah terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok, dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama terdapat dampak positif dan besar dari komponen PAD terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Solok sesuai standar kemandirian daerah. Sementara itu, hanya PAD lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan di Kabupaten Solok.

REFERENSI

- Abdullah, Asmawanti, & Febriansyah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi 18, 1999*(December), 1–6.
- Admin Sumbar Post. (2019). *Alfis Primatra : PAD Kabupaten Solok Rendah, Karena Potensi Belum Tergarap Maksimal*. Sumbarpost.com. <https://sumbarpost.com/alfis-primatra-pad-kabupaten-solok-rendah-karena-potensi-belum-tergarap-maksimal/>
- Alfarisi, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Daerah Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–25. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/1651/1274>
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(3), 32–41. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822>
- Aprilianda, G. M. A. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Hal -39*, 2(1), 39–51.
- Aswar, K. (2019). Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4(6), 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.164>

- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>
- Bank Indonesia. (2017). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Daerah Sumatera Barat Periode November 2017*. BI.go.id. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-Prov-Sumbar-Periode-November-2017.aspx>
- Cherrya, D. W. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Hal -39*, 2(1), 39–51.
- Elsye, R. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Ermawati, Andaresta, H., & Aswar, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran (Size) Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/13359>
- Faroza, T. O., & Susanti, D. (2021). *Analisis Perbandingan Kinerja keuangan Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 Abstract : Financial performance is the result or description of the operational activities that the company has carried*. 4(3), 445–455.
- Galariotis, E., Guyot, A., Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2016). A novel multi-attribute benchmarking approach for assessing the financial performance of local governments: Empirical evidence from France. *European Journal of Operational Research*, 248(1), 301–317. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.06.042>
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, M., & Barford, A. (2018). The depths of the cuts: The uneven geography of local government austerity. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11(3), 541–563. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsy019>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mahsun. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Sari, B. I., & Wati, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta.